



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900/0047.1

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN, VERIFIKATOR DAN
PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator dan Pembantu Bendahara pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator dan Pembantu Bendahara pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai program/kegiatan/sub kegiatan bidang tugasnya pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tahun dan tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program kegiatan APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal, 19 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

PENGGUNA ANGGARAN



DYAH LUKISARI

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Para Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
2. Pertinggal.

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 900/0047.1
Tanggal : 19 Januari 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN, VERIFIKATOR DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, SP M Si NIP. 19810925 200604 1 003 Kasubbag Program	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT	I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD B. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengolahan Retribusi Daerah C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya F. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian G. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya H. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
2.	DHANI SARDONO WIYOTO, S.TP. MM NIP. 19801017 201001 1 004 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN	I. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2. Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi 3. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi 4. Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) B. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.	NATARINA SUKANINGSIH, S.Pt,M.Si NIP. 19790914 200312 2 008 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	I. Program Penanganan Kerawanan Pangan A. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 4. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
4.	NURLAELA RETNO UTAMI, SP NIP. 19700522 199603 2 004 Penelaah Teknis Kebijakan	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BIDANG PENGANEKARAGAMAN DAN KONSUMSI PANGAN	I. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal B. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 1. Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5.	NETI SETYO MAHANANI, SP NIP. 19820626 201001 2 019 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BIDANG KEAMANAN PANGAN	I. Program Pengawasan Keamanan Pangan A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
6.	ENDAR SUTRISNO, S.TP, M.Sc NIP. 19820325 201101 1 012 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BALAI MUTU DAN SERTIFIKASI PANGAN KELAS A	I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah A. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD B. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor C. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD II. Program Pengawasan Keamanan Pangan A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
7.	NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi NIP. 19731113 199803 1 003 Sekretaris	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	Melaksanakan Fungsi dan Tata Usaha Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
8.	DJOKO PONTJO NUGROHO, SE NIP. 19680331 199503 1 003 Kasubbag Keuangan	VERIFIKATOR	SPP/SPM UP, SPP/SPM GU, SPP/SPM TU dan LS Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
9.	NOVA EKA CRISTIAWAN NIP. 199111042025211012 Staf Subbag Keuangan	VERIFIKATOR	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.	ALDY NOVIAN WIBOWO NIP. 199811302025211009 Staf Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	VERIFIKATOR	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
11.	YUNIS AMRIATIN, SP NIP. 19840607 201902 2 003 Staf Bidang Keamanan Pangan	VERIFIKATOR	Bidang Keamanan Pangan 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
12.	ALIVIA SALMA LIHAYATI, S.KM. NIP. 19951121 202012 2 014 Staf Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	VERIFIKATOR	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
13.	RACHMAD FAJAR WIBISONO, S.P. NIP. 199412012023211014 Staf Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	VERIFIKATOR	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
14.	SRI HANDOYO, S.P NIP. 19780417 201101 1 001 Staf Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A	VERIFIKATOR	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
15.	MELTRI NUGRAHENI, A.Md.Ak. NIP. 20000729 202201 2 003 Staf Subbag Keuangan	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
16.	SUNOKO NIP. 19811003 201001 1 012 Staf Subbag Keuangan	PEMBANTU BENDAHARA	Pengelola Gaji Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

PENGGUNA ANGGARAN



DYAH LUKISARI